

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl.Gatot Subroto No.114 A Kajangan Sonorejo Blora

Nomor Telepon : 0296525114

Penjelasan Umum : PT.BPRBKKBLORA(PERSERODA) DALAM MELAKSANAKAN TATAKELOLA SENANTIASA BERLANDASKAN PADA LIMA PRINSIP.DALAM RANGKAIAN UNTUK MEMBUDAYAKAN PENERAPAN 5(LIMA)PRINSIP DASAR TATAKELOLA,BANK MELAKUKAN PENILAIAN SENDIRI(SELFASSESSMENT)SECARA BERKALA MELIPUTI 9 FAKTOR YAITU:1.PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN DIREKSI;2.PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS;3.KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI KOMITE;5.PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN;6.PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO;7.BMPK;8.RBB;9.TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN.URAIAN SINGKAT DARI PRINSIP PELAKSANAAN TATAKELOLA PT.BPR BKK BLORA(PERSERODA)ADALAH SEBAGAI BERIKUT:1 KETERBUKAAN(TRANSPARENCY)YAITU KETERBUKAAN DALAM MENGEMUKAKAN INFORMASI YANG MATERIAL DAN RELEVAN SERTA KETERBUKAAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN.2.AKUNTABILITAS ACCOUNTIBILITY)YAITU KEJELASAN FUNGSI DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN BPR.3.TANGGUNGJAWAB(RESPONSIBILITY)YAITU KESESUAIAN PENGELOLAAN BPR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BANK YANG SEHAT.4.INDEPENDENSI (INDEPENDENCY)YAITU PENGELOLAAN BPR SECARA PROFESIONAL TANPA PENGARUH/TEKANAN DARI PIHAK MANAPUN.5.KEWAJARAN(FAIRNESS)YAITU KEADILAN DAN KESETARAAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK STAKEHOLDERS YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	PUGUH HARYONO	Direktur Utama	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DIREKSI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN TATA KELOLA YAKNI SEBAGAI BERIKUT: A.DIREKSI TELAH MENGELOLA BANK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.B.DIREKSI SENANTIASA MENINDAKLANJUTI TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK, AUDITOR EKSTERNAL, HASIL PENGAWASAN OJK, PPAK DAN/ATAU HASIL PENGAWASAN OTORITAS LAIN.C.DIREKSI PT BPR BKK BLORA (PERSERODA) TELAH MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BPR DALAM SETIAP KEGIATAN USAHA BANK PADA SELURUH TINGKATAN ATAU JENJANG ORGANISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA, ANGGOTA DIREKSI WAJIB MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN ATAU PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BANK.D.DIREKSI PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA UNTUK KEPENTINGAN BANK DALAM MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUANNYA.E.DIREKSI TELAH MENGAWASI DAN MEMASTIKAN BAHWA SELURUH KOMPONEN YAITU MELIPUTI:SOP,KEBIJAKAN DAN ATURAN YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Slamet Pamuji	Komisaris Utama dan Independen	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS ANGGOTA A.DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERUSAHAAN SECARA KOLEKTIF TELAH BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA DIREKSI SERTA MEMASTIKAN TERSELENGGARANYA PENERAPAN TATA KELOLA BPR TELAH DILAKSANAKAN. DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN, PENGAWAS TELAH MENGARAHKAN, MEMANTAU, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BPR. B.DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SERTA MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DILARANG IKUT TERLIBAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL, KECUALI : - PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ; DAN - HAL-HAL LAIN YANG DITETAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. C.KETERLIBATAN ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL MERUPAKAN BAGIAN DARI TUGAS DAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SEHINGGA TIDAK MENIADAKAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN KEPENGURUSAN BANK. TUGAS PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS TERSEBUT MERUPAKAN UPAYA PENGAWASAN DINI YANG PERLU DILAKSANAKAN. D.DEWAN KOMISARIS TELAH MEMASTIKAN BAHWA DIREKSI TELAH MENINDAKLANJUTI TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK, AUDITOR EKSTERNAL, HASIL PENGAWASAN OJK DAN/ATAU HASIL PENGAWASAN OTORITAS LAINNYA. E.DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA, DEWAN KOMISARIS TELAH MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI SETIAP ANGGOTA, YANGMENGATUR TENTANG : -ETIKA KERJA; -WAKTU KERJA; -PENGATURAN RAPAT; -PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; - PENGHASILANDAN PENGHARGAAN.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

JUMLAH DEWAN KOMISARIS PADA AKHIR TAHUN 2022 HANYA 1 ORANG YAITU KOMISARIS ANGGOTA SDR SLAMET PAMUJ, SH MH, YANG TELAH DICATAT DALAM ADMINISTRASI OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: S -517/KR.0313/2021 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021, SEDANGKAN KOMISARIS UTAMA TELAH SELESAI MASA BHAKTI TGL 10 SEPTEMBER 2022. PERSYARATAN BERUPA JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS SEPERTI YANG DITENTUKAN OLEH REGULATOR SUDAH TERPENUHI, DENGAN GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT : A. JUMLAH DEWAN KOMISARIS PADA POSISI AKHIR DESEMBER 2022 ADALAH 1 ORANG BERTEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN HAL INI KURANG EFEKTIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAUPUN DALAM PENGAWASAN AKTIF DEKOM DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA. B. DEWAN KOMISARIS DILARANG IKUT TERLIBAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL, KECUALI : - PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ; DAN - HAL-HAL LAIN YANG DITETAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. C. KETERLIBATAN ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL MERUPAKAN BAGIAN DARI TUGAS DAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SEHINGGA TIDAK MENIADAKAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN KEPENGURUSAN BANK. D. DEWAN KOMISARIS TELAH MEMASTIKAN BAHWA DIREKSI TELAH MENINDAKLANJUTI TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA AUDIT INTERN BANK, AUDITOR EKSTERNAL, HASIL PENGAWASAN OJK DAN/ATAU HASIL PENGAWASAN OTORITAS LAINNYA. E. DEWAN KOMISARIS TELAH MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI SETIAP ANGGOTA. F. DEWAN KOMISARIS SENANTIASA MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN RBB SECARA SEMESTERAN KEPADA OJK DENGAN TEPAT WAKTU MELALUI LAPORAN ELEKTRONIK APOLO. G. DI DALAM LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA BEBERAPA REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI UNTUK PENGEMBANGAN PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA) KE DEPAN.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2017 PERIHAL : PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR BAHWA BPR DENGAN MODAL INTI PALING SEDIKIT RP. 80.000.000.000 (DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) WAJIB UNTUK MEMBENTUK KOMITE. PADA POSISI 31 DESEMBER 2022 PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) KOMPOSISI MODAL INTI SEBESAR RP. -52,291.557.532 (LIMA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RUPAH), SEHINGGA WAJIB MEMBENTUK KOMITE - KOMITE. BANK MASIH DALAM PROSES PEMBETUKAN KOMITE2 DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2017 PERIHAL : PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR BAHWA BPR DENGAN MODAL INTI PALING SEDIKIT RP. 80.000.000.000 (DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) WAJIB UNTUK MEMBENTUK KOMITE. PADA POSISI 31 DESEMBER 2022 PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) KOMPOSISI MODAL INTI SEBESAR RP. - 52,291.557.532 (LIMA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RUPAH), SEHINGGA WAJIB MEMBENTUK KOMITE - KOMITE. BANK MASIH DALAM PROSES PEMBETUKAN KOMITE2 DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2017 PERIHAL : PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR BAHWA BPR DENGAN MODAL INTI PALING SEDIKIT RP. 80.000.000.000 (DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) WAJIB UNTUK MEMBENTUK KOMITE. PADA POSISI 31 DESEMBER 2022 PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) KOMPOSISI MODAL INTI SEBESAR RP. - 52,291.557.532 (LIMA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RUPAH), SEHINGGA WAJIB MEMBENTUK KOMITE - KOMITE. BANK MASIH DALAM PROSES PEMBETUKAN KOMITE2 DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR, SAHAM DARI PEMPROV JATENG DAN PEMKAB BLORA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PUGUH HARYONO	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR, SAHAM DARI PEMPROV JATENG DAN PEMKAB BLORA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PUGUH HARYONO	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKTUR UTAMA BERASAL DARI PIHAK YANG INDEPENDEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YAKNI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BPR SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP MODAL DI BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIK SAHAM DIPERUSAHAAN LAIN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Slamet Pamuji	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BANK SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN. KEBERADAAN PENGAWAS INDEPENDEN INI DAPAT MENCIPTAKAN CHECK AND BALANCE, MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN STAKEHOLDERS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Slamet Pamuji	0	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU HUBUNGAN DENGAN BANK SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI KEMAMPUANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN. KEBERADAAN PENGAWAS INDEPENDEN INI DAPAT MENCIPTAKAN CHECK AND BALANCE, MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN STAKEHOLDERS DEWAN KOMISARIS DAN KELUARGA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	Fasilitas lainnya	Asuransi kesehatan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PENETAPAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT.BPR BKK BLORA (PERSERODA) DENGAN MEMPERHATIKAN TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO BERDASARKAN : A. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN B. ANGGOTA DIREKSI KARENA JABATANNYA DIBERIKAN GAJI POKOK BESARNYA : - DIREKTUR UTAMA MENERIMA GAJI POKOK MAKSIMAL 2,5 (DUA KOMA LIMA) KALI GAJI POKOK TERTINGGI PADA DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI; C. DIREKTUR UTAMA MENDAPAT FASILITAS : (A.06 20)- PERAWATAN KESEHATAN YANG LAYAK TERMASUK ISTRI DAN SEBANYAK-BANYAKNYA 2 (DUA) ANAK; - KENDARAAN DINAS - TUNJANGAN - TUNJANGAN YANG LAZIM.C. SESUAI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 2019 PASAL 20 TENTANG PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DEWAN KOMISARIS DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:- KETUA DEWAN KOMISARIS MENDAPATKAN HAK PENGHASILAN 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) DARI PENGHASILAN DIREKTUR UTAMA; - ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MENDAPATKAN HAK PENGHASILAN 80 % (DELAPAN PULUH PERSEN) DARI PENGHASILAN KETUA DEWAN KOMISARIS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,07	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,05	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,04	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PERBANDINGAN GAJI TERTINGGI DENGAN GAJI TERENDAH KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI DISAJIKAN PER POSISI 31 DESEMBER 2022 ADALAH SEBAGAI BERIKUT : - RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 2,7 : 1 - RASIO GAJI DIREKSI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 1,25 : 1 - RASIO GAJI KOMISARIS YANG TERTINGGI DAN TERENDAH = 1,25 : 1 - RASIO GAJI DIREKTUR UTAMA DENGAN DEWAS TERTINGGI = 2,5 ; 1 - RASIO GAJI DIREKSI TERTINGGI DAN PEGAWAI TERTINGGI = 2,4 : 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-12-2022	14	PENANGANAN NPL
2	14-12-2022	3	RENCANA SETORAN MODAL,PENGADAAN INVENTARIS,RBB
3	10-01-2022	38	EVALUASI RENCANA BISNIS BANK TRIWIULAN 1 2021 DAN AGENDA RAPAT KOORDINASI SERTA PENGAWAN AKTIF DEWAN PENGAWAS

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
RAPAT-RAPAT DEWAN KOMISARIS PADA TAHUN 2022 ADALAH SEBAGAI BERIKUT NO TOPIK RAPAT TANGGAL PESERTA RAPAT 1PENANGANAN NPL 14 DES 202211ORANG 2RENCANA SET MODAL , PENGADAAN INVENTARIS , RBB12 NOV 20223 ORANG 3PEMANTAUAN RENC KERJA, TATA KELOLA, PENANGANAN NPL 3 CABANG 17 SEPT 2022 38ORANG 4 APATDEKOMPEMANTAUANPERMASALAHN , REWARD PUNISHMEN , PENANGANAN NPL 25 AGUST 20224 ORANG 5PENYERTAAN MODAL PEMEGANG SAHAM 27AGUSTUS 2022 4 ORANG 6 EVALUASI KINERJA , PENURUNAN NPL , BEDAH KASUS , TYPE KLASUUTK MASING2 CABANG DIPERHATIKAN 20AGUSTUS 2022 18 ORG7TARGET MASING 2 CABANG UNTUK DITUANGKAN DALAM USILAN DEKOM 2 JULI 2022 42 ORNG 8CAPAIAN KINERJA YANG MAKSIMAL UNTUK MENDORONG KINERJA BPR BKK BLORA8 JULI 2022 2ORG9PENANGANAN NPL MELALUI PENGACARA NEGARA , KPKNL30 JUNI 2022 2 ORANG10MENYEMPUNAKAN KEMBALI TATAT TERTIB DEKOM DIREKSI 17 JUNI 20223 ORG11TYPE KLAS DENGAN MEMEPRTIMBANGKAN FAKTOR NPL , PEMBINAAN KPD SELURUH KARYAWAN20 JANUARI 2022 3 ORG12PELAKSANANN PENGADAAN AKTOVA TETAP DAN INCNTARIS 8 JANUAR 2022 3 ORG JUMLAH RAPAT 12 PERTEMUAN			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Slamet Pamuji	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 bank tidak ada pemberitaan negatif baik dalam media masa atau media lainnya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BANK PADA TAHUN 2022 TIDAK MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TAHUN 2022 BELUM ADA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN BANK BERKOMITMEN UNTUK MENANGANI SEMUA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN TUNDUK KEPADA PERATURAN TERKAIT YANG ADA ANTARA LAIN PERATURAN OJK, SEPANJANG TAHUN 2021, TIDAK TERDAPAT TRANSAKSI YANG MELIBATKAN PENGAWAS, DIREKSI, PEJABAT EKSEKUTIF YANG MENGANDUNG POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220106	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR1	akademi AL	4.550.000
2	20220111	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR2	ijin BPMKB	1.000.000
3	20220216	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR3	smbgn yysn	15.000.000
4	20220217	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR4	yysn/CSR/kp	800.000
5	20220225	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR5	Pmsnn baju/CSR/kp	5.500.000
6	20220301	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR6	sponsor sirkon	1.000.000
7	20220315	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR7	bantuan pmbngnan	2.000.000
8	20220331	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR8	mnymbut bln suci	1.105.000
9	20220331	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR9	lomba moral	892.500
10	20220411	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR10	partisipasi yysn	500.000
11	20220412	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR11	bntuan acr	1.000.000
12	20220419	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR12	bntuan keg sos	750.000
13	20220423	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR13	bln Bhakti	6.519.000
14	20220512	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR14	prtsipsi barisan muda	500.000
15	20220518	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR15	prtsipsi bappeda	1.500.000
16	20220615	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR16	prtsipsi forum pemred	750.000
17	20220615	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR17	prtsipasi pb jaya	750.000
18	20220621	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR18	sbngn pem masjid	1.000.000
19	20220627	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR19	sponsorship pmbngn	4.044.000
20	20220628	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR20	sponsorship pesonas	3.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	20220628	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR21	penggulu ngn kemiskinan	10.213.000
22	20220630	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR22	keg wsta alam dharmawanita	6.497.000
23	20220715	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR23	keg lomba mural	1.000.000
24	20220723	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR24	keg kejurprov	10.000.000
25	20220729	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR25	bantuan bedah rumah	30.000.000
26	20220809	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR26	Pmbelian sembako	7.625.000
27	20220816	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR27	bantuan bpk asuh anak stunting	2.700.000
28	20220823	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR28	bantuan launching	4.000.000
29	20220823	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR29	pmby tentatif	12.000.000
30	20220825	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR30	bntuan kejurda	1.552.500
31	20220912	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR31	pembyan rmh literasi	2.750.000
32	20220920	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR32	prgrm pndmpgn	5.000.000
33	20220922	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR33	kejurnas bola	1.500.000
34	20220923	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR34	bantuan thp II	2.700.000
35	20220926	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR35	partisipasi klub bola	1.000.000
36	20220926	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR36	pelksn pra pekan olahraga	2.000.000
37	20220927	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR37	set bln dana pmi	1.500.000
38	20221003	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR38	santunan ank yatm piatu	750.000
39	20221018	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR39	gerkan jateng bntu ptani	1.200.000
40	20220218	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR40	mnymbut hr jd kab blora	1.000.000
41	20221031	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR41	pembyaran bapk asuh	2.700.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
42	20221110	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR42	bantuan panti asuhan	500.000
43	20221114	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR43	keg kirab	2.251.500
44	20221118	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR44	partisipasi ke pmd	11.625.000
45	20221121	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR45	sumbg pmbiayan seminar sastra	15.000.000
46	20221202	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR46	bantuan masjid miftahul karim	500.000
47	20221212	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR47	partisipasi pbsi	4.000.000
48	20221214	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR48	bantuan rmh litrasi	11.000.000
49	20221221	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR49	keg pmran rakam jejak	1.000.000
50	20221222	Kegiatan Sosial	PENERIMA CSR50	bantuan bencana alam	6.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	: PT BPR BKK Blora (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Gatot Subroto No. 114 A Kajangan Sonorejo Blora
Nomor Telepon	: (0296) 525114
Modal Inti BPR	: 52.291.557.632,00
Total Aset BPR	: 387.315.315.045,00
Bobot BPR	: C
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,8
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG)dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri(self assesment)dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tatakelola Bank,penilaian efektifitas pelaksanaan GCG,serta penilaian kualitas hasil pelaksanaan.Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan PT.BPR BKK BLORA(Perseroda)dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri(self assessment)dengan nilai komposit 3 dengan peringkat cukup baik beberapa penyesuaian harus dilaksanakan pada tahun 2023,1.Terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang berjumlah 1 (satu)orang,dengan modal inti diatas Rp.50.000.000(lima puluh milyar rupiah)paling sedikit Rp.80.000.000.000,-(delapan puluh milyar rupiah)maka jumlah dan komposisi minimal 3(tiga)orang Direksi,namun pada bulan Januari 2023 kekosongan jabatan Direksi PT BPR BKK Blora telah terisi Direktur Pemasaran berdasarkan RUPSLB tanggal 24 Januari 2023.2.Beberapa penyesuaian struktur organisasai PT BPR BKK Blora (Perseroda)pada posisi Desember 2022 dengan modal inti diatas Rp.50.000.000.000(lima puluh milyar rupiah)kurangdariRp.80.000.000.000(delapan puluh milyar rupiah)bank wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris Independen,Bank akan mememnuhi struktur tersebut pada tahun 2023.3.Penyesuaian menjadi BPR dengan Kegiatan Usaha 3 (KU3)dengan beberapa ketentuan termasuk pembentukan Komite dan Satuan Kerja di organisasi,bank Merencanakan pemenuhan srtuktur pada tahun 2023 dan Bank merencanakan beberapa pembayaran non tunai pada tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,59	0,95	0,28	2,82	0.564	BAIK
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,50	0,95	0,20	2,65	0.398	BAIK
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BAIK
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	CUKUP BAIK
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,70	1,20	0,27	3,17	0.317	CUKUP BAIK
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,50	1,10	0,23	2,83	0.283	CUKUP BAIK
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,20	0,30	2,50	0.063	CUKUP BAIK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	1,26	0,35	3,28	0.328	CUKUP BAIK
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,25	2,45	0.184	CUKUP BAIK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	CUKUP BAIK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,10	0,30	2,90	0.218	CUKUP BAIK
Nilai Komposit						2.8	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Sampai dengan posii 31 Desember 2021 bank hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi, yaitu Direktur Utama
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Direktur Utama tidak merangkap Jabatan yang lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Direktur Utama i tidak ada hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direktur Utama tidak pernah menggunakan penasihat dan / atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	3	Direktur Utama telah lulus Uji Kompetensi dan mempunyai Sertifikasi Kompetensi serta diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	3,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,59	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, tidak melakukan pengalihan tugas dan tanggungjawab
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit Intern maupun ekstern
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data informasi kepada Dewan Pengawas yang lengkap
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Apabila dalam pengambilan keputusan yang strategis tidak terjadi perbedaan pendapat Direksi mengambil suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak pernah menggunakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan bank
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi memberikan pendidikan / pelatihan peningkatan kualitas individu kepada para pegawai demi meningkatkan kualitas SDM
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Dalam melaksanakan kerja berpedoman pada etika kerja, waktu kerja
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Dalam pelaksanaan tugasnya direksi mempertanggungjawabkan lewat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kebijakan dan strategis menyampaikan kepada semua pejabat eksekutif dan di teruskan oleh PE kepada semua pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Risalah hasil rapat Direksi dicatat dalam notulen hasil rapat dan didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi dan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berguna untuk peningkatan kinerja
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Laporan penerapan Tata kelola tahun 2021 disampaikan kepada OJK, dan Asosiasi BPR
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Dewan Komisaris BPR BKK Blora sampai dengan posisi 31 Desember 2021 sebanyak 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah Anggota Dewan Komisaris 2 (Dua) orang dan Jumlah Direksi hanya 1 Orang hal ini kurang baik dalam penerapan tata kelola bank
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	3	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah Lulus Uji Kemampuan dan Kematangan mempunyai Sertifikasi serta diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan salah 1 (Satu) orang Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Blora.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	Bank memiliki modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	bank memiliki pedoman dan etika kerja dan dijalankan dan telah diterapkan pada semua bidang
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris atau Direksi lebih dari 2 (dua) BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	sampai dengan posisi 31 Desember 2021 bank Belum mempunyai Anggota Dewan Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	27	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberi nasihat secara tertulis kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Kebijakan yang bersifat strategi selalu dipantau oleh Dewan Komisaris melalui rapat koordinasi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional di bank
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temua audit intern maupun ekstern
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan rapat dewan komisaris dihadiri anggota dewan pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan , dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat yang dicatat dalam notulen hasil rapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan kepentingan pribadi atau merugikan perusahaan (bank)
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dikarenakan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terisi
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	setiap hasil rapat Dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki Buku Pedoman prosedur Penanganan Benturan Kepentingan di Bank
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan prosedur para tahun 2022 belumdada laporan untuk benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Ya , Di tahun 2022 tidak terjadi keputusan, yang terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ada sehingga untuk penyaluran dana dijalankan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Masih terdapat kekosongan Direktur Umum dan yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Bank telah menunjuk pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi kepatuhan dan manajemen resiko
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara berkala telah melakukan penginikan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Ketentuan Intern pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dalam proses
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	3,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Masih terdapat kekosongan Direktur Umum dan yang membawahkan fungsi kepatuhan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan pelatihan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Masih terdapat kekosongan Direktur Umum dan yang membawahkan fungsi kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa Keuangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan revidi, merekomendasikan dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR telah melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan yang berlaku sehingga bisa menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Masih terdapat kekosongan Direktur Umum dan yang membawahkan fungsi kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak pernah melaporkan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan, karena kebijakan atau ketentuan BPR tidak pernah menyimpang dari peraturan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	3	Modal inti Bank dibawah Rp. 50 Milyar, dan telah memiliki Pejabat Eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SKAI telah memiliki pedoman audit dan rencana audit serta program kerja yang telah disetujui Direktur Utama
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Dalam pelaksanaan audit intern, pejabat SKAI independen terhadap penghimpunan dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	SKAI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Pedoman program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern masih dalam proses.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Dalam pelaksanaan audit intern berpedoman sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern diawali dengan program kerja dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan berlaku.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Secara berkala SKAI mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak ekstern untuk meningkatkan kemampuan SDM audit intern.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Hasil audit dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada tahun 2022 tidak terjadi penyimpangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan Kepala SKAI telah dilaporkan keada OJK sebagaimana surat Direksi No.793/KP/X/2016 Tanggal 2 Oktober 2016
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	KAP yang telah ditunjuk bank telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja dan standar profesional akuntan publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	audit di tahun 2021 bank menggunakan KAP Tarmizi Accmad dan sudah terdaftar dalam OJK No STTD.AP-81/PB.122/2018 tgl 5 Februari 2018
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	bank menyampaikan pada saat audit OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil Audit KAP telah dikirim
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hasil audit telah sesuai dengan cakupan ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	4	Bank belum membentuk satuan kerja manajemen resiko dan kepatuhan namun rencana pembentukan satker akan direncanakan pada triwulan 1 Tahun 2023
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Sudah melekat pada Kebijakan dan manajemen resiko
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur manajemen resiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan pengawas telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	bank blm sepenuhnya pengendalian risiko seutuhnya dilakukan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR belum seluruhnya menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum sepenuhnya menerapkan Menejemen Risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Bank sudah memiliki sistem yang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan pengembangan budaya Menejemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	3,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,26	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menyusun profil risiko sesuai dengan ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Bank blm menyusun laporan produk baru,sampai saat ini belum ada produk baru
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,35	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	bank telah memiliki ketentuan BMPK yang mengacu pada PKPB No 03 tahun 2020
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank telah melakukan proses mengkinikan PKPB
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melanggar dan atau melampaui BMPK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melanggar dan atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran dana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	RBB bank telah disusun oleh direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB Yang disusun telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB tahun 2022 disahkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	RBB BPR telah disusun sesuai dengan cakupan yang ada dalam peraturan yang berlaku
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris Laporan pengawasan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Untuk Rencana Bisnis dan perubahan nya di sampaikan kepada OJK melalui sistem aplikasi Apolo
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem core banking yang digunakan oleh BPR telah memadai sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan keuangan Publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan Tahunan 2022 telah disusun dan diaudit oleh KAP sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah melaksanakan transparansi dan informasi produk sesuai dengan ketentuan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah melaporkan publikasi ke OJK Triwulan IV Tahun 2022 pada yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	tahun 2022 tidak terjadi pengaduan nasabah dan BPR telah melaporkan pengaduan nasabah dengan hasil Nihil melalui SIPEDULI
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Blora (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Nama : PUGUH HARYONO
JABATAN : DIREKTUR UTAMA
2. NAMA : SLAMET PAMUJI, SH.MH
JABATAN : KOMISARIS ANGGOTA

Dengan ini memberikan persetujuan atas lapoan hasil Tata Kelola PT. BPR BKK Blora (PERSERODA) urntuk periode 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NAMA BPR	PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA)
Posisi Laporan	31 Desember 2022
Alamat	Jl. Gatot Subroto No 114A Blora
Nomor Telepon	(0296) 525114
Modal Inti BPR	Rp. 52.291.557.532
Total Aset BPR	Rp 387.315.315.045
Bpbot BPR	B
Status Audit Ekstern	1
Nilai Komposit	3
Penringkat Komposit	Cukup Baik
Analisis	

Blora, 28 Februari 2023

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK BLORA (Perseroda)**



PUGUH HARYONO
Direktur Utama



SLAMET PAMUJI, SH.MH
Komisaris Anggota

KESIMPULAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

3. Nama : PUGUH HARYONO
JABATAN : DIREKTUR UTAMA
4. NAMA : SLAMET PAMUJI, SH.MH
JABATAN : KOMISARIS ANGGOTA

Dengan ini memberikan persetujuan atas lapoan hasil Tata Kelola PT. BPR BKK Blora (PERSERODA) urntuk periode 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NAMA BPR	PT. BPR BKK BLORA (PERSERODA)
Posisi Laporan	31 Desember 2022
Alamat	Jl. Gatot Subroto No 114A Blora
Nomor Telepon	(0296) 525114
Modal Inti BPR	Rp. 52.291.557.532,-
Total Aset BPR	Rp. 387.315.315.045
Bpbot BPR	B
Status Audit Ekstern	1
Nilai Komposit	3
Penringkat Komposit	Cukup Baik
Analisis	Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (self assesment) dengan mempertimbangkan penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, penilaian efektifitas pelaksanaan GCG, serta penilaian kualiatas hasil pelaksanaan. Pelaksanaan GCG secara umum telah dilaksanakan PT.BPR BKK BLORA (Perseroda) dengan baik sesuai dengan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) dengan nilai komposit 3 dengan peringkat cukup baik Beberapa penyesuaian harus dilaksanakan pada tahun 2023 1. Terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang berjumlah 1(satu) orang,dengan modal inti diatas Rp.50.000.000 (lima puluh milyar rupiah) paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) maka jumlah dan komposisi

	minimal 3(tiga) orang Direksi , namun pada Bulan Januari 2023 kekosongan jabatan Direksi PT BPR BKK Blora telah terisi Direktur Pemasaran berdasarkan RUPS LB tanggal 24 Januari 2023. 2. Beberapa penyesuaian struktur organisasai PT BPR BKK Blora (Perseroda) pada posisi Desember 2022 dengan modal inti diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) kurang dari Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) bank wajib memiliki paling sedikit 1(satu) Dewan Komisaris Independen, Bank akan mememnuhi struktur tersebut pada tahun 2023. 3. Penyesuaian menjadi BPR dengan Kegiatan Usaha 3 (KU3) dengan beberapa ketentuan termasuk pembentukan Komite dan Satuan Kerja di organisasi , bank merencanakan pemenuhuhan srtuktur pada tahun 2023 dan Bank merencanakan beberapa pembayaran non tunai pada tahun 2023.
--	--

Blora, 28 Februari 2023

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR BKK Blora (Perseroda)**


PUGUH HARYONO
Direktur Utama



SLAMET PAMUJL, SH.MH
Komisars Anggota